

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TUAN GURU KYAI HAJI MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MAJID

Chaidir Amry, Zakaria Ansori
Universitas Islam Negeri Mataram
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

zakariaansori@uinmataram.ac.id

Abstrak

Semangat keagamaan diwujudkan dengan begitu banyak varian, lebih-lebih jika kepercayaan akan agama sudah mengakar di dasar hati. Agama menawarkan suatu cara pandang hidup yang mampu meng-cover setiap tindakan, perbuatan yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya. Islam demikian juga, membuat aturan baku untuk setiap umatnya—yang dalam hal ini mengatur setiap sisi-sisi kehidupan baik dalam setiap aspeknya, baik sosial, budaya, hukum dan model khilafah (sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi saw). Agama dan pemerintahan (politik) dua sisi yang dianggap bersebrangan. “agama” sebagai dasar berpolitik, dalam melestarikan keyakinan yang anut terkadang mengalami hambatan, karena pemerintah menganggap sebagai salah batu sandungan yang mampu menggeser ketahanan pemerintahan. Sebagaimana aktivitas politik Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid akan terlihat jelas pasca kemerdekaan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa Indonesia dengan mewakili kaum muslimin di Pulau Lombok. Karir politik Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dimulai sejak diangkat sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama (NU) Sunda Kecil pada tahun 1950. Pada tahun 1952 beliau diangkat menjadi Ketua Badan Penasihat Partai Masyumi untuk daerah Lombok, ini disebabkan pada waktu itu Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas lainnya tergabung dalam partai Masyumi.

Kata Kunci: *Pemikiran, Politik Islam, dan Tuan Guru.*

A. Latar Belakang

Politik Islam sudah mulai bermunculan pada pra-kemerdekaan Indonesia. Islam dianggap sebagai pembawa kesadaran nasionalisme untuk melawan penjajah. Yakni para kyai dan ulama pada awal dekade 1900-an menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (masyarakat pribumi).¹ Ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa organisasi yang berbasis Islam seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 dan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Umat Islam pasca-kemerdekaan pernah tergabung dalam satu wadah politik yaitu partai Masyumi yang disepakati setelah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai satu-satunya partai politik umat Islam.

Dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno membuat beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno dan dianggap sebagai otoriter hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari

pemimpin tersebut ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 september 1960.

Pada masa Orde Baru, kalangan Islam kesulitan melakukan artikulasi politik meski telah berkerjasama dalam menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Rezim Orde Baru tidak hanya menolak merehabilitas partai Masyumi tapi juga dengan tegas menolak kembali pemimpin-pemimpin partai tersebut dalam kehidupan politik. Sampai akhirnya negara menyederhanakan partai politik. Partai-partai Islam tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan, untuk yang nasionalis dan non-Islam tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penyerdehanaan ini dilakukan agar mengurangi konflik dan aktifitas partai mudah dikontrol oleh negara.²

Karir politik Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dimulai sejak diangkat sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama (NU) Sunda Kecil pada tahun 1950. Pada tahun 1952 beliau diangkat menjadi Ketua

¹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 152

² Ibid., hal 174

Badan Penasihat Partai Masyumi untuk daerah Lombok, ini disebabkan pada waktu itu Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas lainnya tergabung dalam partai Masyumi.³

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) pada tahun 1953. Nahdlatul Wathan menganut “politik bebas” dari tahun 1953-1955. Namun, pada tahun 1955 memilih untuk berafiliasi dengan partai Masyumi sehingga Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diangkat menjadi anggota Konstituante periode 1955-1959, hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada tahun 1955. Partai Masyumi dikucilkan oleh DPRGR pada bulan April 1960 dan diperintahkan untuk membubarkan diri empat bulan kemudian, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merubah haluan politiknya ke partai Golongan Karya (Golkar) pada 28 September 1970. Alasan berafiliasinya dengan Golkar karena pemerintah

Orde Baru telah melakukan represi politik terhadap Ormas-Ormas Islam untuk memilih Golkar.

Dalam Pemilihan Umum tahun 1971 dan 1977, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari partai Golkar. Kemudian terpilih menjadi anggota MPR-RI Fraksi Utusan Daerah pada tahun 1982.

Politik Nahdlatul Wathan kepada Golkar merupakan embrio bagi konflik internal organisasi tersebut. Sebab, sebagian kader-kader Nahdlatul Wathan lebih memilih garis politiknya dengan berafiliasi dengan Partai Pembangunan Persatuan (PPP) yang *notabene* merupakan partai Islam. Namun, dipertengahan rezim Orde Baru Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tak lagi memobilisator kemenangan Golkar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan lebih condong kepada PPP meski beliau masih berafiliasi dengan Golkar. Menurutnya “politik asal politik yang lama kelamaan menjadi licik”⁴. Seperti

³ Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), hal 245

⁴Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan ...*,

rezim Orde Baru yang sangat terkenal sebagai rezim diktator, disebutkan juga dalam syairnya.

*Kalau orang berjiwa basi
Hanya mengejar bayangan
kursi Tidak peduli tuntunan
ilahi Selalu menendang ayat
al-kursi⁵*

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah ulama sekaligus politikus. Hubungan antara agama dan politik tidak terlepas dari semangat beliau dalam melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Pengertian dakwah yang lebih luas bahwa penyebaran agama Islam bisa dilaksanakan melalui jalur-jalur politik sebagai metode dakwah. Pandangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tentang agama tergambar pada syairnya yang berbunyi;

*Agama bukanlah sekedar
ibadah Puasa, sembayang di
atas sajadah Tapi agama
mencakup aqidah Mencakup
syariah mencakup hukumah.⁶*

hal 244

⁵Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, (Lombok Timur: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, 2002), hal. 52

⁶ Ibid., hal. 37.

Syair di atas menjelaskan bahwa agama tidak sekedar urusan ibadah yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah SWT. Akan tetapi agama lebih dalam lagi tentang Aqidah yaitu keyakinan, dalam sebuah keyakinan terdapat hukum-hukum. Dengan demikian Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menggunakan politik sebagai jalan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok.

Pemikiran keagamaan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid beraliran Alussunnah wal Jama'ah. Penjelasan ini terdapat pada asas Nahdlatul Wathan yaitu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah ala Madzhabil Imam Asyafi'i r.a⁷. Dengan demikian maka dalam asas tersebut telah tercermin jiwa perjuangan Nahdlatul Wathan yaitu Islam, Ahlussunnah Wal Jamaah, Madzhab Imam Syafi'i r.a.

Aktivitas politik Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid akan terlihat jelas pasca

⁷Afifuddin Adnan, *Diktat Pelajaran Ke-NW-an*, (Pancor: Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, 1983), hal. 10.

kemerdekaan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa Indonesia dengan mewakili kaum muslimin Pulau Lombok.

B. Politik Islam

Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekadar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Syari'ah Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa, misalnya tergambar dalam tatanan syari'at tentang berkomunitas (*mu'asyarah*) antar sesama manusia. Sedangkan mengenai kehidupan bernegara, banyak disinggung dalam ajaran fiqih siyasah dan sejarah Khilafah al-Rasyidah.⁸

⁸ KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 202.

Pada tingkat global, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya hampir dikuasai oleh kaum barat dengan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga sebagian umat Islam menggunakan nilai-nilai Islam dalam acuan berpolitik, baik secara simbolik atau pun substantif untuk membentuk suatu pemerintahan Islam, terutama kalangan yang konsen dengan perjuangan untuk menyatukan politik dan agama agar dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam, khususnya untuk melindungi diri dari hegemoni barat.⁹ Aktivitas politik Islam menimbulkan beberapa gerakan, baik yang berjuang secara struktural (dalam pemerintahan), Perjuangan politik Islam melalui struktural adalah upaya-upaya menekankan melalui penetapan sistem nasional maupun kebijakan publik yang Islami. Selain itu, sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah, kontrol terhadap pemerintah sudah diungkapkan oleh semua ulama dan intelektual muslim, sebagai manifestasi dan konsep *amr ma'ruf*

⁹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik...*, hal. 93.

nahi munkar yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, termasuk terhadap pemerintah.¹⁰ dan berjuang secara kultural (di luar pemerintahan), yakni politik Islam yang diwujudkan melalui upaya perubahan kesadaran tingkah laku umat Islam tanpa keterlibatan negara dan tanpa perubahan sistem nasional menjadi sistem Islami. Aktivitas politik Islam kultural yaitu mewujudkan dirinya secara substantif dalam lembaga-lembaga kebudayaan dan peradaban Islam. singkatnya adalah berjuang untuk menyebarkan Islam melalui dakwah, pendidikan, seni, dan sebagainya.

Di kalangan ulama dan intelektual muslim di dunia terdapat tiga pandangan hubungan antara ajaran islam dengan masalah kenegaraan. *Pertama*, adalah kelompok konservatif, yang tetap mempertahankan integritas antara Islam dan negara, karena menurut mereka, Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini

terdiri dari (a) tradisional, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) fundamentalis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Qutub dan Abu al-A'la al-Maududi dan Hasan Tarabi. *Kedua*, adalah kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis bisa mengadopsi sistem lain, yang dalam hal ini adalah sistem barat yang sudah menunjukkan kelebihanannya. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal, dan Muhammad Asad. *Ketiga*, yang memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini Islam, seperti agama-agama lainnya, tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di

¹⁰ Masykuri Abdillah "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini" dalam Komaruddin Hidayat (ed), *Islam, Negara, & Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005). Hal. 88.

barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.¹¹

C. Negara dan Islam

Dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan istilah atau konsep tentang negara. Namun, konsep negara bukan tidak ada sama sekali dalam Islam, karena secara substantif terdapat sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Sedangkan, negara Islam itu sendiri baru muncul pada pertengahan abad ke-20, yang dipahami sebagai negara yang melaksanakan etika dan syariah Islam. Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; kejujuran dan tanggungjawab, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukan atau pluralisme, persamaan, permusyawaratan, mendahulukan perdamaian, dan kontrol.¹²

¹¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), terj. Drs. Wahib wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 57

¹² Masykuri Abdillah "Negara Ideal Menurut...", hal. 74

Di dalam politik, banyak pemikir Islam ingin Islam menjadi sistem hukum maupun sebagai sistem pemerintahan, bahkan ada gagasan yang menginginkan membentuk negara Islam, mereka yang menginginkan membentuk negara Islam sebab melihat negara Madinah sebagai prototipe negara Islam yang ideal.

Gagasan negara Islam penuh utopia karena menawarkan konteks masa lalu untuk masa kini yang penuh dengan paradoks dan dialetika. Gagasan ini menimbulkan protes dari kalangan internal Islam, mereka berpendapat, penyatuan agama dan politik akan mencemarkan makna etis dan kesucian agama, karena politik cenderung kooperatif, manipulatif dan palsu. Jika dipadukan dengan politik, agama justru menjadi sangat bias kepentingan. Disini kita bisa kutip pernyataan Nurcholis Madjid:

"konsep negara Islam merupakan distorsi atas keterkaitan yang proporsional antara negara dan agama. Negara adalah aspek kehidupan profane berdimensi

rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya adalah spiritual dan individual".¹³

Di kalangan pemikir Islam terdapat tiga tipologi terkait hubungan Islam dan negara: *Pertama*, Tipologi hubungan organik dan bentuk pemerintahan teo-demokrasi. Tipologi ini melihat bahawa Islam adalah agama sekaligus negara. Hubungan Islam dan negara betul-betul organik di mana negara berdasarkan syariah Islam dengan ulama sebagai penasihat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Pemikir dari tipologi ini antara lain, Rasyid Ridha, Sayyid Qutub, Abu al-A'la al-Maududi, dan di Indonesia Muhammad Natsir.¹⁴ *Kedua*, Tipologi sekuler. Islam adalah agama murni bukan negara. Negara tidak harus diatur agama, begitupun sebaliknya negara juga tidak boleh mengintervensi urusan agama. Pemikir

dari tipologi ini adalah Ali Abd al-Raziq, A. Luthfi Sayyid, dan di Indonesia Soekarno.¹⁵ *Ketiga*, Tipologi Moderat. Tipologi ini menolak klaim ekstrem bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral dan etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik. Pemikir yang termasuk tipologi ini adalah Muhammad Husein Haikal, Muhammad Abduh, Fazlurrahman, Moahmed Arkoun, dan di Indonesia Nurcholish Madjid.¹⁶

D. Biografi Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memiliki nama kecil Muhammad Saggaf lahir di Kampung Bermi, Desa Pancor, Lombok

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1994), cet. Ke-6, Hal. 61

¹⁴ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama Dan Negara, Demokrasi, civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup), hal. 21.

¹⁵ Ibid., hal. 26

¹⁶ Ibid., Hal 31.

Timur pada hari rabu 17 rabiul awal 1326 (1904 M). Dari pasangan Tuan Guru Haji Abdul Madjid dan Hj. Halimatussa'diyah. Anak bungsu dari enam bersaudara, yaitu, Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Shabur dan Hajah Masyitah.¹⁷

Ketika Muhammad Saggaf dan ayahnya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ayahnya bertemu dengan seorang ulama yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia yaitu Syaikh Muhammad Zainuddin Serawak. Sebab ketertarikan inilah Muhammad Saggaf diganti namanya menjadi Zainuddin oleh ayahnya sendiri setelah menunaikan ibadah haji.¹⁸

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memulai pendidikan di dalam keluarga, belajar mengaji dan berbagai ilmu agama diajarkan langsung oleh ayahnya, dimulai sejak berumur lima tahun sampai sembilan tahun. Beliau memasuki pendidikan formal pada

sebuah sekolah umum yang disebut Sekolah Rakyat Negara (Sekolah Gubermen), di sekolah tersebut beliau belajar selama empat tahun.¹⁹

Selain pendidikan formal, beliau juga diserahkan ayahnya untuk belajar ilmu agama kepada Tuan Guru lokal saat itu, antara lain, Tuan Guru Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa'id dari Pancor, dan Tuan Guru Abdullah Bin Amaq Dulaji dari Kelayu Lombok Timur.²⁰ pola belajar yang dilakukan oleh Tuan Guru lokal ini masih sangat tradisional (konservatif), yang dikenal dengan pola belajar *halaqah*, yaitu murid-murid duduk bersila di atas tikar dan mendengarkan gurunya membaca kitab yang sedang dipelajari. Setelah itu, murid-murid secara bergantian membaca.²¹

Pada saat itu murid-murid yang mengaji di rumah seorang Tuan Guru tidak dipungut bayaran. Sebagai gantinya mereka diharuskan bekerja disawah Tuan Guru tersebut.

¹⁷ Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan* ..., hal 123

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan* ..., hal. 134

²⁰ Ibid.

²¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hal. 341 -342.

Sedangkan, Muhammad Saggaf, karena keinginan kuat ayahnya agar beliau menjadi murid yang pandai, ayahnya sanggup membayar dengan 200 ikat padi setahun (sekitar dua ton padi/gabah), sebagai ganti kewajiban bekerja di sawah. Dengan kesediaan tersebut, ayahnya bermaksud agar kegiatan proses belajarnya tidak terganggu dan tetap konsentrasi terhadap apa yang dipelajarinya.²² Kondisi ekonomi keluarga TGH. Abdul Madjid yang cukup baik, membuat beliau termasuk beruntung bisa mengenyam pendidikan formal. Satu dari 845 anak yang bisa bersekolah di seluruh Lombok saat itu.²³

Pada umur tujuh belas tahun, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diajak oleh ayahnya untuk menunaikan ibadah haji sekaligus untuk menuntut ilmu agama di Mekah. Setelah beberapa hari musim haji selesai, Tuan Guru Haji Abdul Majid mencari guru untuk anaknya hingga bertemulah dengan

Syaikh Marzuqi seorang ulama keturunan Arab kelahiran Palembang yang mengajar di Masjidil Haram. Tuan Guru Haji Abdul Majid menyerahkan anaknya kepada Syaikh Marzuqi untuk menuntut ilmu.

Setelah ayahnya pulang ke Lombok, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berhenti belajar mengaji kepada Syaikh Marzuqi disebabkan tidak nyaman dan merasa tidak mengalami perkembangan selama menuntut ilmu di sana. Namun, belum sempat mencari guru baru, terjadi perang saudara di Saudi Arabia antara Fraksi Wahabi melawan kekuasaan Syarif Husein. Peperangan ini menyebabkan Masjidil Haram dalam keadaan sepi tanpa ada aktivitas pengajian. Pada saat itu beliau bersama temannya, Sayyid Syeikh Muhsin al-Musawa sempat belajar sastra dengan spesifikasi syair-syair Arab kepada Syaikh Muhammad Amin al-Kutbi. Awal kedatangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Ottoman Turki,

²² Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan* ..., hal. 135

²³ Alfons Van Der Kraan, *Lombok: Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870-1940* (Yogyakarta: Lenggé, 2009), hal. 207

dideklarasikannya negara Republik Turki oleh Kemal Attaturk.

Dua tahun setelah terjadinya perang saudara Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bertemu dengan Haji Mawardi dari Jakarta. Dari perkenalan itu, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diajak untuk menuntut ilmu di Madrasah al-Shaulatiyah. Madrasah yang didirikan pada tahun 1219 H, oleh ulama besar imigran India yaitu Syaikh Rahmatullah Ibnu Khalil al-Hindi al-Dahlawi.

Madrasah al-Shaulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat legendaris dan telah menghasilkan ulama-ulama besar dunia. Kiyai Haji Hasyim Asyari (pendiri NU), Kiyai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dan ratusan ulama di wilayah Asia Tenggara. Madrasah ini didirikan Syeikh Muhammad Rahmatullah yang berasal dari India. Penulis anonim asal India, seperti dikutip Abdul Latif Abdallah Dohaish dalam *History of Education in the Hijaz up to 1925* (1978)

membeberkan, pada tahun 1912, salah satu priode puncak dalam sejarah madrasah ini. Dari jumlah total 537 murid, komposisi mereka dari negeri asal sebagai berikut: Turki 13 orang, Hijaz 4, Yaman 6, Indonesia 178, Irak 8, Syria 3, India 74, Afghanistan 4, dan Bukhara 22. Laporan tahunan al-Shaulatiyah (1913) mengemukakan data yang lebih akurat. Komposisi murid Hijaz 186 orang, India 108, Indonesia 156, Bukhara 23, Afghanistan 18, Iraq 6, Iran 6, Yaman 8, dan Hadramaut 7 Orang. Melihat angka-angka ini, bisa dipahami kalau Faisal Abd Allah al-Aqawi, dalam *At Ta'lim al-Ahli li al-Banin Makkah al-Mukarramah* (1404 H/1984 M), menyatakan al-Shaulatiyah merupakan kanchah murid-murid Jawi.²⁴

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan diantar oleh Haji Mawardi langsung bertemu dengan mudir Madrasah al-Shaulatiyah tersebut yaitu Syeikh Salim Rahmatullah yang merupakan cucu

²⁴ Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 155.

dari pendiri Madrasah al-Shaulatiyah. Seorang murid baru harus mengikuti tes masuk untuk menentukan kelas. Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diuji langsung oleh Syeikh Salim Rahmatullah dan Syeikh Hasan Muhammad al-Masysyath. Penguji menentukan beliau masuk di kelas III. Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menolak dan memaksa untuk masuk di kelas II, dengan alasan ingin mendalami ilmu nahwu-sharaf.

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selalu memanfaatkan waktu untuk belajar. Seperti yang diungkapkan oleh murid beliau yaitu, Tuan Guru Haji Yusuf Makmun sebagai berikut:

“Selain di Shaulatiyah, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga mencari guru di luar (mengaji luar). Jadi sepulang dari madrasah beliau mengaji di rumah-rumah ulama, ini selalu dilakukan sampai beliau lulus di Madrasah al-Shaulatiyah, sehingga beliau memiliki

banyak guru. Guru-gurunya yang dibanggakan berjumlah 53 orang”.²⁵

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berhasil menyelesaikan studinya dalam kurun waktu enam tahun. Padahal lama belajar normal adalah selama sembilan tahun. Dari kelas II, beliau loncat ke kelas IV, tahun berikutnya ke kelas VI, pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut naik ke kelas VII, VIII, IX. Selama mengikuti pelajaran, beliau tercatat sebagai murid berprestasi. Beliau juga sering ditunjuk untuk mewakili di berbagai acara seperti saat ada kunjungan pengawas madrasah dari kerajaan saudi.²⁶

Dengan prestasi akademik dan kecerdasan yang sangat tinggi, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berhasil lulus dari Madrasah al-Shaulatiyah dengan predikat *mumtaz* (*summa cumlaude*). Guru-guru di Madrasah al-Shaulatiyah merasa kesulitan memberikan nilai kepada Tuan Guru Kyai Haji

²⁵ Yusuf Makmun, *wawancara*, Pancor, 5 Desember 2017

²⁶ Masnun, *Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam Di Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Pustaka al-Miqdad, 2007), hal 19

Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seperti ungkapan Ustadz Mursyidin,

“para guru di Madrasah al-Shaulatiyah merasa kesulitan memberikan nilai, sebab nilai Zainuddin berada di atas rata-rata, sedangkan pemberian nilai yang populer pada masa itu adalah nilai 10. Jika nilai 10 ini diberikan kepada Zainuddin maka murid Shaulatiyah lainnya tidak berhak diberikan nilai 10. Setelah dilakukan musyawarah, maka diputuskan Zainuddin diberikan nilai sepuluh dengan tanda bintang di atasnya. Hanya dua mata pelajaran yang murni bernilai sepuluh.”²⁷

Begitu lulus Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin langsung diminta mengajar di Madrasah al-Shaulatiyah, sembari menunggu adiknya yang masih bersekolah di Mekah, beliau mengajar di Madrasah al-Shaulatiyah hanya selama dua tahun. Beliau disuruh pulang ke Lombok oleh guru kesayangannya, yaitu Syaikh Hasan Muhammad al-Masysyath. “pahalamu bukan di Mekah, tapi pahalamu ada di

²⁷ Mursyidin, *wawancara*, Pancor, 5 Desember 2017

Lombok”.²⁸ Lebih jauh, Dr. Tohri menjelaskan:

“guru-guru di Madrasah Shaulatiyah memarahi murid-murid Indonesia yang tidak membantu memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, (kira-kira ucapannya seperti ini) ‘buat apa anda menjadi ulama sedangkan tanah airmu masih dijajah’.”²⁹

E. Pemikiran Politik Islam Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid

Sepulang dari menuntut ilmu selama dua belas tahun di Tanah Suci Mekah, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dipercayai oleh masyarakat untuk menjadi imam dan khatib. Selain itu, beliau sering melakukan safari dakwah ke berbagai tempat di Pulau Lombok. Setelah mempunyai reputasi di masyarakat, beliau mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama pesantren al-Mujahidin pada tahun 1934 M. Mulanya pesantren al-Mujahidin

²⁸ Yusuf Makmun, *wawancara*, Pancor, 5 Desember 2017

²⁹ Tohri, *wawancara*, Mataram, 20 Februari 2018

menerapkan pembelajaran dengan sistem halaqah. Namun dinilai tidak efektif, sistem halaqah diganti dengan sistem klasikal, sistem klasikal ini pun mengalami banyak kendala sehingga dibentuklah sistem semi klasikal.

Berdirinya pesantren al-Mujahidin menimbulkan kecurigaan pemerintah Hindia Belanda, sehingga pemerintah mengirim mata-mata untuk memantau aktivitas di pesantren. Pemerintah Hindia Belanda merasa terancam dengan berdirinya pesantren. Pada suatu waktu, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dipanggil untuk menghadap pemerintah seperti yang diilustrasikan oleh Tuan Guru Haji Yusuf Makmun, sebagai berikut:

“untuk apa mendirikan pesantren ?” tanya pemerintah Hindia Belanda “Saya mendirikan pesantren untuk mengajar anak sasak agar mereka belajar tentang agamanya secara maksimal ” jawab Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid.

“Saya curiga anda menanam doktrin untuk melawan pemerintah”

“Kalau pemerintah wajib kami dukung, ajaran Islam mengajarkan untuk membantu, tunduk dan taat kepada pemerintah” kata Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid.³⁰

Meski pemerintah berkali-kali mendatangi atau memanggil Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk menghadap, diplomasi yang dilakukannya membuat pesantren al-Mujahidin tetap aman dan terhindar dari gangguan pemerintah. Maka, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan bebas menanam doktrin kepada masyarakat dan murid-muridnya untuk melawan penjajah, bukan melawan pemerintah, sebab saat itu yang memerintah adalah penjajah.

Pesatnya perkembangan pesantren al-Mujahidin, mendorong Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk membangun sebuah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di pulau Lombok. Setelah bangunan fisik madrasah dianggap selesai, Tuan Guru

³⁰ Yusuf Makmun, *wawancara*, Pancor, 5 Desember 2017

Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengajukan permohonan pendirian madrasah kepada pemerintah Hindia Belanda *Kontrolier Oost* Lombok di Selong, Lombok Timur. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan surat izin akte pendirian madrasah pada tanggal 17 Agustus 1936 M. Satu tahun kemudian, pada tanggal 22 Agustus 1937 Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) diresmikan.³¹

Kemajuan-kemajuan yang dicapai NWDI, kemudian melahirkan gagasan untuk membangun lembaga pendidikan agama yang dikhususkan untuk perempuan. Maka pada tanggal 21 April 1943, berdiri sebuah lembaga pendidikan agama khusus perempuan yang diberi nama Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI).

Masuknya Jepang di pulau Lombok setelah mematahkan pemerintahan Hindia Belanda, tidak membuat madrasah menjadi lebih baik, bahkan menambah ancaman bagi madrasah NWDI dan NBDI, selain reaksi keras dari masyarakat yang anti

terhadap madrasah. Kolonial Jepang lebih sering mengawasi dan menjadikan madrasah sasaran utama kebijakan-kebijakan diskriminatif. Madrasah NWDI dan NBDI hampir saja ditutup oleh kolonial Jepang. Namun, datang surat kawat dari pemerintah Jepang di Bali yang memperbolehkan madrasah NWDI dan NBDI untuk tetap beroperasi tapi namanya diganti menjadi Sekolah Imam dan Penghulu.³² Di sisi lain, pengajian-pengajian yang dipimpin oleh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dibatasi ruang geraknya dan bahkan dilarang. Inilah yang menghambat laju perkembangan madrasah NWDI dan NBDI.

Pasukan sekutu yang menyerang Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, memaksa Jepang menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di depan rumah nomor 56 di Jalan Pegangsaan Timur, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adam Malik, telah mengusahakan disarkannya

³¹ Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan* ..., hal 186

³² *Ibid.*, hal 198

berita mengenai berdirinya negara merdeka Republik Indonesia melalui radio. Proklamasi kemerdekaan berarti tidak hanya berakhirnya penjajahan Jepang, tetapi juga penjajahan Belanda.³³

Kabar kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, terdengar di Lombok sekitar bulan Oktober. Setelah mengetahui kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, tidak lantas berdiam diri, melainkan terus mengawal Kemerdekaan. Pasukan Australia yang ditugaskan Sekutu mendarat di Ampenan 30 November 1945, dan mulai beroperasi di Lombok. Kedatangan tentara Australia yang tugas utamanya melucuti senjata Jepang, tidak membawa perubahan lebih baik di Lombok. Justru memuluskan NICA (*Netherlands Indies Civil Administrations*) masuk ke Sunda Kecil pada bulan Maret 1946. Pasukan NICA dalam waktu singkat menguasai daerah-daerah yang diduduki pasukan

Australia, diganti dengan pasukan Belanda dan bekas pegawai pamong praja, seperti residen, asisten residen, kontrolir atau jabatan lainnya, bahkan mendirikan tangsi-tangsi militer.

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid membuat suatu gerakan bawah tanah yang disebut gerakan al-Mujahidin yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Muhammad Faishal dan Tuan Guru Haji Ahmad Rifa'i. Gerakan ini bergabung bersama gerakan Banteng Hitam, gerakan Bambu Runcing, BKR, API di Pulau Lombok menyerbu markas NICA di Selong pada tanggal 7 Juni 1946 dan mempertahankan kemerdekaan serta keutuhan bangsa Indonesia³⁴. Akibat dari pertempuran tersebut Tuan Guru Haji Muhammad Faishal, sayyid muhammad sholeh dan Abdullah gugur di medan tempur. Sedangkan Tuan Guru Haji Ahmad Rifa'i dan Muhammad Yusi Muhsin tertangkap dan ditahan di Bali. Bahkan, Tuan Guru Haji Ahmad Rifa'i pernah dibuang ke Ambon.

³³ Kapitsa M.S dan Maletin N.P, *Soekarno; Biografi Politik*, terj. B. Soegiharto, (Bandung: Ultimus, 2009), Hal. 107.

³⁴ Masnun, *Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam Di Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Pustaka al-Miqdad, 2007), hal. 27.

Keutuhan kemerdekaan Indonesia di Pulau Lombok yang dipelopori oleh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menjadikannya *Amirul Hajji* ke Mekah dari Negara Indonesia Timur (NIT) tahun 1947, menjadi anggota delegasi NIT ke Saudi Arabia tahun 1948-1949, menjadi konsulat Nahdlatul Ulama (NU) sunda kecil tahun 1950, menjadi Ketua Badan Penasehat Partai Masyumi daerah Lombok tahun 1952.

Di tahun 1953, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Organisasi Nahdlatul Wathan (NW) pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor Lombok Timur. Sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah. Berdirinya organisai NW dilatarbelakangi karena. *Pertama*, pertumbuhan dan perkembangan cabang-cabang Madrasah NWDI dan NBDI, majlis dakwah dan majlis ta'lim yang begitu pesat. *Kedua*, karena desakan petinggi partai Masyumi yang meminta untuk membentuk sebuah organisasi massa sebagai basis suara

partai Masyumi, sebab saat itu NU akan keluar dari Masyumi.³⁵

Tohri mengungkapkan: "maulana syeikh adalah sosok yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ketika perlu mendirikan madrasah, maka beliau bangun madrasah, ketika perlu dibangun sekolah formal, maka beliau bangun, begitu juga ketika dirasa perlu dibangun perguruan tinggi, beliau bangun"

Selain membangun pondok pesantren, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga membangun sekolah formal dan perguruan tinggi Islam, untuk mencerdaskan masyarakat Lombok. Sekolah dan perguruan tinggi yang beliau bangun antara lain: Tahun 1964 mendirikan Akademik Paedagogik Nahdlatul Wathan, tahun 1965 mendirikan Ma'had Daril Quran wal Hadits al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathan, Tahun 1974 mendirikan Ma'had lil Banat, Tahun

³⁵ "Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia; Dalam Pendidikan, Politik dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia", dalam *Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*, 2017, hal. 50.

1977 mendirikan Universitas HAMZANWADI, Tahun 1977 menjadi rektor Universitas HAMZANWADI, Tahun 1977 mendirikan Fakultas Tarbiyah HAMZANWADI, Tahun 1978 mendirikan STKIP HAMZANWADI, Tahun 1978 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) HAMZANWADI, Tahun 1982 mendirikan Yayasan Pendidikan HAMZANWADI, Tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) HAMZANWADI, Tahun 1987 mendirikan Universitas Nahdlatul Wathan, Tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) HAMZANWADI.

Saleh Sungkar mendirikan organisasi Persatuan Umat Islam Lombok (PUIL) Pada tahun 1947, bersama-sama Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid.³⁶ Lalu PUIL menggabungkan diri ke dalam Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) cabang Lombok yang dibawa oleh Syekh Abdul Manan. NU pada waktu itu berafiliasi dengan beberapa organisasi Islam bergabung dan

³⁶ Burhan D. Magenda, "Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal", *Antropologi Indonesia*, Vol. 29, Nomor 2, 2005, hal. 187.

membentuk partai Masyumi. maka di tahun 1949, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama Saleh Sungkar mendirikan cabang partai Masyumi di Lombok.³⁷

Tahun 1950, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diangkat sebagai Konsulat NU Sunda Kecil menggantikan Syekh Abdul Manan.³⁸ Pada tahun 1952, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diangkat menjadi Ketua Badan Penasihat Partai Masyumi untuk daerah Lombok.

Pada bulan Oktober Tahun 1952 Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki basis terbesar di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah keluar dari partai Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik.³⁹ Penarikan diri NU dari Masyumi menimbulkan dampak yang luar biasa di dalam tubuh Masyumi. Ada beberapa kekecewaan NU terhadap Masyumi. *Pertama*, NU tidak menyetujui perubahan rumusan

³⁷ Ibid.,

³⁸ Abdurrahman Wahid, "Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Dimata Gusdur", dalam <http://www.tabayyunews.com/2016/10/tuan-guru-haji-lalu-muhammad-faisal.html>, diakses tanggal 5 Desember 2017, pukul 03.00.

³⁹ Masykuri abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan....*, hal. 35.

Majelis Syura dalam AD/ART Masyumi pada muktamar ke-14 tahun 1949 di Yogyakarta, kedudukan NU hanya sebagai badan penasehat, organisasi tidak menyediakan tempat yang layak terhadap para ulama. *Kedua*, kalangan NU menginginkan posisi Menteri Agama dalam kabinet, namun usul KH. Wahab Hasbullah tidak terpenuhi, karena menteri agama ketika itu adalah KH. Fakih Usman dari Muhammadiyah. Kalangan ini melihat kepemimpinan dalam partai Masyumi tidak memberikan tempat yang layak terhadap kyai dan bahkan hanya sebagai pelengkap saja.⁴⁰

Keluarnya NU dari partai Masyumi, mengubah struktur kepengurusan di dalam tubuh NU. Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memilih tetap berada di partai Masyumi. Sebelum NU menyatakan diri keluar, para petinggi Partai Masyumi di Jawa sudah melihat gelagat Nahdlatul Ulama yang mulai menyatakan ketidakpuasan, jika Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi, maka dikhawatirkan massa pendukung

⁴⁰ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik...*, hal. 168-169.

yang ada di Lombok juga akan ikut tercerai-berai, sehingga massa pendukung yang sebagian besar berada di bawah pengaruh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang menjadi epicentrum politik, harus segera diikat dalam organisasi selain NU, untuk menjadi anggota istimewa.⁴¹ maka pada tanggal 1 Maret 1953, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Beliau menyatakan NW menganut “politik bebas”. Namun, hanya dari tahun 1953-1955. Di tahun 1955 Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memasukkan Nahdlatul Wathan (NW) ke dalam partai Masyumi. “Masyumi merupakan konsensus ulama, beliau taat pada konsensus tersebut”.⁴² Masuknya NW menambah kekuatan partai Masyumi, selain dari organisasi Islam lokal dan Nasional, juga masih banyaknya orang NU, dalam bidang politik berkiblat ke

⁴¹ “Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia; Dalam Pendidikan, Politik dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia”, dalam *Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid*, 2017, hal. 50.

⁴² Tohri, wawancara, januari 2018.

partai Masyumi, dikarenakan berpegang pada semacam fatwa KH. Hasyim As'ari bahwa Masyumi satu-satunya partai Islam Indonesia yang sah.⁴³

Berafiliasinya NW dengan partai Masyumi membuat Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diangkat menjadi anggota Konstituante periode 1955-1959, dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955.

Selama menjadi anggota konstituante, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid aktif ikut bersidang dan berdinamika, berkantor di Bandung, Jawa Barat. Berbagai hal terkait sidang serta pengalamannya selama menjadi Anggota Dewan Konstituante, seringkali diceritakan kepada para muridnya, sebagai bahan pembelajaran.

Ustadz Mursyidin mengungkapkan: "maulana syeikh berpolitik untuk memberikan

pelajaran, bukan hanya untuk murid-murid beliau tetapi juga untuk masyarakat Lombok, bahwa bukan suatu yang haram seorang ulama itu berpolitik, sebab pada saat itu tuan guru yang masuk ke dunia politik masih sangat dianggap tabu oleh masyarakat Lombok".⁴⁴

Selain ikut dalam memperjuangkan asas dasar negara, terpilihnya beliau menjadi anggota Konstituante juga untuk mengakomodir aliran kepercayaan yang ada di Lombok, TGH Abdul Hamid, pengasuh yayasan al-Amin yang merupakan tokoh NU dan Mantan DPR Kota Mataram mengungkapkan:

"Maulana Syeikh mengakomodir aliran kepercayaan, yang berada di luar agama yang sudah ditetapkan oleh negara, agar tidak digunakan sebagai senjata oleh bangsa lain. Seperti ketika disumpah, maulana syeikh menggunakan 'aku berjanji' bukan 'aku bersumpah', sebab menurut beliau janji lebih kuat daripada sumpah, kalau sumpah kita

⁴³ Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 161.

⁴⁴ Mursyidin, wawancara, Pancor, 5 Desember 2017

langgar, masih bisa dibayar, tapi kalau janji tidak bisa kita bayar, jadi janji itu lebih kuat daripada sumpah, padahal yang biasa menggunakan 'aku berjanji' adalah aliran kepercayaan."⁴⁵

Berbagai manuver yang dilakukan petinggi Partai Masyumi ini tidak sesuai lagi dengan prinsip dalam Masyumi. TGH Abdul Hafidz Sulaiman bersama Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melayangkan surat kritik pada 12 Mei 1959 yang judulnya "Risalah Bandung". Isinya, beliau tidak menerima perlakuan tidak adil/tidak aman terhadap anggota masyumi yang kebanyakan bermazhab syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yang duduk di pimpinan partai masyumi yang mengaku diri bermazhab telah berupaya memboikot, menghantam dan merong-rong mazhab yang telah menjadi jiwa perjuangan mereka. Kritik ini karena perilaku pengurus Masyumi di Lombok yang telah mempolitisasi kamu bermazhab syafi'i. Ada juga yang telah membuat yayasan yang hanya dibungkus nama Islam, tetapi diisi oleh

⁴⁵ Abdul hamid, *wawancara*, Mataram, 2 Februari 2018.

orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁴⁶ Kekecewaan terhadap partai Islam juga tersirat di dalam wasiat beliau:

Ajaibnya terkadang di partai Islam Berpura-pura membela Islam Aktif keliling siang dan malam Membela diri melupakan Islam⁴⁷

Sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi liberal dari tahun 1949-1959, sehingga partai politik bebas menentukan ideologi negara Republik Indonesia, maka muncullah gagasan Islam sebagai ideologi bernegara dari Muhammad Natsir. Di dalam sidang Majelis Konstituante pada 10 November 1956, Seluruh partai Islam menyetujui gagasan tersebut, akan tetapi partai Islam kalah suara dengan pendukung Pancasila sebagai ideologi bernegara.⁴⁸

Presiden Soekarno didukung oleh angkatan bersenjata mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, tentang "*kembali keundang-undang*

⁴⁶ Patompo Adnan, *TGH Abdul Hafidz Sulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru-Sebuah Biografi*, (Lombok Barat: mujahid press, 2013). Hal. 88

⁴⁷ Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat...*, hal. 55.

⁴⁸ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan...*, hal. 35

dasar 1945".⁴⁹ Di tahun yang sama Presiden Soekarno juga merubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno yang dianggap otoriter, hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari pemimpin partai Masyumi ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 September 1960. Di lain pihak, Soekarno memberikan kesempatan yang baik kepada partai Komunis dan mengumumkan kebijakan tentang NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis).⁵⁰ Semenjak partai Masyumi dilarang oleh pemerintah, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak terlalu aktif berpolitik. Meski beliau mendukung berdirinya partai Parmusi di Lombok, yang merupakan duplikasi dari partai Masyumi. Namun, beliau tidak dapat berperan aktif menjadi anggota. Ini disebabkan oleh tidak terakomodirnya aspirasi NW.

Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret, dia melarang PKI

dan organisasi-organisasi massanya dan kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS tahun 1966. Tanggal 11 Maret 1966 merupakan titik awal pemerintahan Orde Baru. Banyak pemimpin Islam berpikir, bahwa hancurnya PKI merupakan kemenangan bagi Islam, selanjutnya Islam akan memperoleh peran penting di kalangan masyarakat dan akan menjadi kekuatan politik di masa Orde Baru. Pemimpin partai Masyumi meminta pemerintah Orde Baru untuk merehabilitas partai Masyumi. Tetapi permintaan tersebut ditolak, bahkan melarang mantan-mantan pemimpin partai Masyumi kembali berpolitik. Tidak hanya itu, pemerintah Orde Baru bahkan menyederhanakan partai politik menjadi tiga: Golkar sebagai partai pemerintah, PPP sebagai partai umat Islam dan PDI sebagai partai nasionalis. Penyerderhanaan ini agar mempermudah pemerintah Orde baru untuk mengontrol partai politik.

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengganti haluan politiknya dengan berafiliasi ke partai Golkar pada 28 September

⁴⁹ Ibid., Hal. 37.

⁵⁰ Ibid., Hal. 38.

1970. Ada beberapa alasan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memilih berafiliasi dengan partai Golkar.

Berafiliasinya ke partai Golkar untuk menyelamatkan NW dari ke-diktator-an Pemerintah, sebab banyak pondok pesantren yang ditutup karena tidak sejalan dengan pemerintah Orde Baru. Tuan Guru Haji Yusuf Makmun menjelaskan maksud Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berafiliasi dengan Golkar:

“Maulana Syeikh (panggilan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid) melihat kewenangan hak prerogatif atau kekuasaan yang sangat kental kepada pemerintah saat itu, maka tidak ada yang paling pas kecuali bersama pemerintah, beliau mengajak semua warga NW dan simpatisan untuk menyalurkan apresiasi politiknya lewat Golkar, sebagai buktinya beliau menanam pohon beringin, ikut dengan pemerintah untuk meneruskan

perjuangan dan menyelamatkan madrasah agar tidak ditutup.”⁵¹

Senada dengan yang diungkapkan oleh TGH Abdul Hamid:

“pondok pesantren yang berkonfrontasi dengan pemerintahan, tidak mendapat bantuan dana, seperti NU misalnya yang ketika itu, tidak berani mencantumkan nama di depan lembaga pendidikannya, masuknya maulana syaikh ke Golkar untuk *back up* pondok pesantren tersebut. Selain itu, untuk mengimbangi paham aliran kiri dan kanan agar mudah dinetralisir.”⁵²

Sedangkan Dr. Khirjan Nehdi, akademisi NW dan WR II Universitas Hamzanwadi mengungkapkan, berafiliasinya NW ke partai pemerintah (Golkar) agar dapat mengakomodir aspirasi masyarakat NW. dan juga sebagai rasa terima kasih karena telah menumpas PKI:

“keberadaan beliau di Golkar tidak lepas dari sejarah kita beragama Islam, tidak ada yang dapat memastikan Orde Baru yang di

⁵¹ Yusuf Makmun, *wawancara*, pancor, 5 Desember 2017.

⁵² Abdul hamid, *wawancara*, 2 Februari 2018

dalamnya ada Golkar, begitupun sebaliknya. Artinya bahwa dalam kondisi Orde Baru yang di dalamnya ada Golkar maka keberislaman ini tumbuh berkembang dengan baik, aman. Itu yang saya maksud dengan dan/atau tanpa Golkar. Dengan Orde Baru yang ada Golkar. Keberagaman kita menjadi baik, harmoni, kalau dihubungkan dengan konteks kebhinnekaan, Orde Baru yang mengusung konsep toleransi. Maka dari itu, salah satu cara berterima kasih kepada Soeharto, yang dianalogikan sejajar dengan Orde Baru dan Golkar, dengan cara mendukung partai Golkar. Karena kalau tidak, mungkin bisa jadi komunis yang berkembang. Jadi dukungan tersebut sebagai rasa terima kasih kepada pemerintah Orde Baru karena telah menumpas PKI. Meski terjadi perdebatan panjang.”⁵³

Sedangkan menurut Dr. Tohri, akademisi NW dan dosen UIN Mataram mengungkapkan: “Maulana syeikh taat pada pemerintah, memilih Golkar merupakan ketaatan kepada

pemerintah. Selain itu, Partai yang tidak pernah terlibat dalam Nasakom adalah Golkar”.⁵⁴

Kedekatan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan pemerintah menjadikan beliau sebagai anggota dewan pertimbangan MUI pusat dari tahun 1971-1982. Begitu juga Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971 dan 1977, beliau terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari partai Golkar. Selama berafiliasi dengan partai Golkar, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid banyak mempromosikan kader-kader terbaik NW untuk duduk di dalam kursi pemerintahan.

TGH. Muhlis Ibrahim, pimpinan pondok pesantren Islahuddinny menerangkan:

“Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, banyak mempromosikan kader-kader terbaik NW untuk duduk di pemerintahan, seperti Tafaul,SH. H. Amnan,SH. Dan lain-lain, supaya menguasai upaya pengembangan dakwah, juga untuk ikut serta dalam

⁵³ Khirjan Nehdi, *wawancara*, Pancor, 6 Desember 2017

⁵⁴ Tohri, *wawancara*, Mataram 20 Februari 2018

memberikan distribusi pemikiran misalnya, untuk mengesahkan undang-undang minuman keras, agar tidak menjadi konsumsi masyarakat luas, semuanya dilakukan untuk menyelamatkan umat. Beliau juga menjadi orang terdepan dalam menjalankan dan menyukseskan program pemerintah seperti Gogo Rancah (GORA), imunisasi, dan program Keluarga Berencana (KB). Karena beliau sangat taat kepada pemerintah.”⁵⁵

Bergitu juga dengan apa yang terjadi di dalam tubuh NW ketika Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memilih untuk berafiliasi dengan partai Golkar terjadi konflik internal, sebab beberapa pengurus NW memilih PPP sebagai kendaraan politik mereka, akhirnya beberapa pengurus yang tidak sejalan dengan organisasi diisngkarkan dari kepengurusan. beliau mengajak semua murid serta simpatisan untuk memilih Golkar, dianalogikan seperti sholat berjamaah. Di dalam wasiat renungan

masa yang rampung ditulis pada 1 maret 1970 beliau menulis:

“aduh sayang!Pintu NW terbuka lama Bagi anakku yang ingin bersama Mari bersama selama-lama Jangan kembali ke ORDE LAMA”⁵⁶

“aduh sayang! Ta’ ada artinya organisasi Kalau ta’ dito’ati Itu namanya ber NAPSI-NAPSI Ber NAPSU-NAPSU membakar diri”⁵⁷

Dalam Pemilu keempat tahun 1982 beliau terpilih kembali menjadi anggota MPR RI. Namun dari utusan fraksi daerah, sebab dalam pemilihan umum keempat Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak lagi memobilisator partai Golkar dan melakukan politik diam atau gerakan tutup mulut. kekecewaan beliau terhadap Golkar yang sangat otoriter dan pejabat-pejabat di pemerintahan yang dirasa tidak lagi adil dan tidak sesuai janji. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Tohri, “bahwa Golkar banyak mengingkari janji-janjinya”⁵⁸. Hal senada juga

⁵⁵ Muhlis Ibrahim, *wawancara*, Kediri 10 Februari 2018.

⁵⁶ Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat...*, hal. 89.

⁵⁷ *Ibid.*,92

⁵⁸ Tohri, *wawancara*, mataram 20 Februari 2018

diungkapkan oleh Tuan Guru Haji Yusuf Makmun:

“di pemilu keempat, Maulana Syeikh tidak lagi mengusung Golkar sebagai kendaraan politiknya, karena tidak sesuai dengan janji-janji yang diucapkan dulu, ditambah dengan dana yang harusnya untuk NW dipotong oleh pemerintah, inilah yang menambah kekecewaan beliau terhadap Golkar.”⁵⁹

Dengan melakukan politik diam, suara Partai Golkar di Lombok turun drastis meski masih unggul dari partai yang lain. Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid didatangi oleh petugas partai Golkar perihal tersebut. Namun beliau melakukan diplomasi dengan mengatakan: “saya tidak pernah keluar dari Golkar, kalau saya keluar dari Golkar pasti ada surat tertulis”.⁶⁰

Di sisi lain TGH Abdul Hamid menceritakan ketika bertemu dengan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk menyampaikan agar tidak keluar dari Golkar:

⁵⁹ Yusuf Makmun, *wawancara*, Pancor, 5 Desember 2017

⁶⁰ Yusuf Makmun, *wawancara*, Pancor, 5 Desember 2017

“saya bawa nama Gobel, ketika mengunjungi maulana syeikh, beliau ingin keluar dari Golkar bersama Raja Bima, beliau sudah sangat kecewa dengan Golkar, bahasa kasarnya, Golkar sudah tidak bisa diIslamkan, saya sampaikan kepada beliau agar tetap di Golkar, bisa menguntungkan tapi kalau keluar dari Golkar, sangat berbahaya pengaruh maulana syeikh akan hilang, terbukti ketika pemilu di datangkan gubernur sulawesi selatan, Muhammad Lamo, jadilah komputer dalam pemilu, dibuka pemilihan jam 8 diumumkan jam 9 secara nasional”⁶¹

Pindahannya Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Golkar ke PPP juga atas permintaan dari syeikh Ismail Bin Zein Usman al-Yamani. maka beliau mengarahkan masyarakat Lombok untuk memilih PPP. Seperti cerita yang diilustrasikan oleh TGH Turmuzdi Badaruddin, pimpinan pondok pesantren Qomarul Huda, ketika Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diminta oleh Syeikh Ismail Bin Zein Usman al-Yamani untuk

⁶¹ Abdul Hamid, *wawancara*, Mataram 11 Februari 2018

pindah ke PPP, serta cara beliau mengarahkan masyarakat Lombok untuk memilih PPP:

“saat itu saya berada di Mekah dan ditanya oleh guru saya yaitu Syeikh Ismail bin zein usman al Yamani”

‘Turmduzi kamu ikut mana ?’ tanya Syeikh Ismail ‘saya ikut PPP’ jawab TGH Turmudzi ‘Syeikh Zainuddin ikut mana ?’ ‘beliau ikut pemerintah, ikut Golkar’ ‘kalau begitu besok saya ke Lombok’

“ketika Syeikh Ismail berkunjung ke Lombok untuk mengunjungi Tuan Guru Pancor (Zainuddin), saya ikut mengiri Syeikh Ismail ke Pancor bersama Tuan Guru-Tuan Guru yang lain”

Syeikh Ismail meminta ke Tuan Guru Pancor ‘kalau bisa Syeikh Zainuddin untuk memilih PPP’

‘Apa alasan saya kalau memilih PPP, saya sudah mengerahkan NW berserta Banom-Banomnya untuk memilih Golkar, apa kata orang’ jawab Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid

‘Rasullah saja bisa mengubah arah kiblatnya dari Baitul Muqaddis ke Ka’bah’ kata Syeikh Ismail

‘Kalau demikian, baik saya akan pilih PPP’

“ketika Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid

berceramah di masjid Bagu, beliau mengatakan”

‘jama’ah, jangan lagi menghadap ke pohon beringin, banyak setannya, mari kita sama-sama kembali menghadap ke Ka’bah’.

“Kemudian ketika beliau ceramah di Puyung beliau mengatakan”

‘hai jama’ah, sekarang kita pergi ke Mekah mengerjakan haji, sembelih sapi itu, tebang pohon kayu itu, kita bikin gawe yang besar’⁶².

Untuk meredam konflik di dalam tubuh NW ketika Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpindah haluan Politik maka lahirlah gagasan agar NW kembali ke khittah, gagasan tersebut disepakati dan disetujui pada muktamar ke-VII tanggal 24-25 Februari 1986 di Pancor. Dengan

⁶² Turmudzi Badaruddin, *wawancara*, Bagu, 10 Januari 2018.

kembalinya NW ke khittah maka murid atau jama'ah dibebaskan dalam memilih haluan politiknya.

Kesimpulan

Di kalangan ulama dan intelektual muslim di dunia terdapat tiga pandangan hubungan antara ajaran islam dengan masalah kenegaraan. *Pertama*, adalah kelompok konservatif, yang tetap mempertahankan integritas antara Islam dan negara, karena menurut mereka, Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari (a) tradisional, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) fundamentalis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Qutub dan Abu al-A'la al-Maududi dan Hasan Tarabi. *Kedua*, adalah kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur

masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara tehnik bisa mengadopsi sistem lain, yang dalam hal ini adalah sistem barat yang sudah menunjukkan kelebihannya. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal, dan Muhammad Asad. *Ketiga*, yang memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini Islam, seperti agama-agama lainnya, tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.

Sebagaiman aktivitas politik Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid akan terlihat jelas pasca kemerdekaan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa Indonesia dengan mewakili kaum muslimin di Pulau Lombok. Karir politik Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dimulai sejak diangkat sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama (NU) Sunda Kecil pada tahun 1950. Pada tahun 1952 beliau diangkat menjadi Ketua Badan

Penasihat Partai Masyumi untuk daerah Lombok, ini disebabkan pada waktu itu Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas lainnya tergabung dalam partai Masyumi.

Daftar Pustaka

- Afifuddin Adnan, Diktat Pelajaran Ke-NW-an, (Pancor: Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, 1983)
- Alfons Van Der Kraan, Lombok: Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870-1940, (Yogyakarta: Lenggge, 2009)
- Azyumardi Azra, Renaissance Islam Asia Tenggara, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)
- Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia; Dalam Pendidikan, Politik dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia”, dalam Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 2017.
- Burhan D. Magenda, “ Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal”, Antropologi Indonesia, Vol. 29, Nomor 2, 2005
- Kapitsa M.S dan Maletin N.P, Soekarno; Biografi Politik, terj. B. Soegiharto, (Bandung: Ultimus, 2009).
- Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).
- Masykuri Abdillah “Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini” dalam Komaruddin Hidayat (ed), Islam, Negara,& Civil Society, (Jakarta: Paramadina, 2005)
- Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), terj. Wahib wahab, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004).
- Masnun, Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat (Jakarta: Pustaka al-Miqdad, 2007).
- Mohammad Noor, dkk, Visi Kebangsaan Religus; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004).
- Nurcholis Madjid, Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Nurcholish Madjid, Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan, cet. Ke-6, (Bandung: Mizan,1994).

Patompo Adnan, TGH Abdul Hafidz Sulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru-Sebuah Biografi, (Lombok Barat: Mujahid Press, 2013)

Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama Dan Negara, Demokrasi, civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2004).

Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Tuan Turu Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru, (Lombok Timur: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, 2002)